

MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU: SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU, DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI

Oleh:

Asep Nur Imam Munandar¹

Agus Hermawan²

Ria Fitria Andriani³

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

Alamat: Jl. Dewi Sartika, Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat
17113.

Korespondensi Penulis: andar@ibm.ac.id, agus.hermawan@ibm.ac.id,
riafitria@ibm.ac.id.

Abstract. This conceptual research aims to develop an integrative model for building a high-quality and trustworthy Islamic financial institution by synthesizing philosophical foundations, quality management theory, value-based financial accounting, and the principle of tawhid. Using a philosophical framework ontology, epistemology, and axiology the study positions Islamic financial institutions not only as economic entities but as spiritual instruments governed by Islamic ethical values. The model proposes that institutional quality can be achieved through the application of Total Quality Management (TQM) combined with transparent financial reporting rooted in accountability and justice. The epistemological framework emphasizes a synthesis between rational-technical knowledge and divine normative values, forming a unified worldview guided by tawhid. This article provides a new perspective for the development of institutional trust, suggesting that trust should emerge as an organic result of ethical systems, rather than merely from communication or branding. Although conceptual, this study offers theoretical and practical implications that may serve as a foundation for future empirical research in Islamic finance governance.

Received July 16, 2025; Revised August 10, 2025; August 24, 2025

*Corresponding author: andar@ibm.ac.id

MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU: SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU, DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI

Keywords: *Axiology, Islamic Financial Institution, Total Quality Management, Tawhid, Accounting.*

Abstrak. Penelitian konseptual ini bertujuan mengembangkan model integratif dalam membangun lembaga keuangan syariah yang bermutu dan terpercaya, melalui sintesis antara landasan filsafat ilmu, teori manajemen mutu, akuntansi keuangan berbasis nilai, serta prinsip tauhid sebagai dasar etis dan spiritual. Dengan pendekatan filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi, penelitian ini memosisikan lembaga keuangan syariah bukan semata entitas ekonomi, melainkan instrumen spiritual yang diatur oleh nilai-nilai etika Islam. Model yang ditawarkan menunjukkan bahwa mutu kelembagaan dapat dicapai melalui penerapan *Total Quality Management* (TQM) yang dikombinasikan dengan pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan adil. Kerangka epistemologis yang digunakan menekankan pentingnya sintesis antara pengetahuan rasional-teknis dan nilai normatif-ilahiyyah, sehingga membentuk pandangan dunia yang terpadu dalam naungan tauhid. Artikel ini menawarkan perspektif baru dalam pengembangan kepercayaan publik kelembagaan, di mana trust muncul sebagai buah dari sistem etis yang substansial, bukan sekadar hasil dari strategi komunikasi. Meskipun bersifat konseptual, studi ini memberikan implikasi teoritis dan praktis yang dapat dijadikan pijakan bagi penelitian empiris selanjutnya dalam tata kelola keuangan syariah.

Kata Kunci: Aksiologi, Kelembagaan Keuangan Syariah, Manajemen Mutu Total, Tauhid, Akuntansi.

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah kenyataan yang menggembirakan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini berkembang dari pinggiran menuju arus utama, menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional. Namun, pertumbuhan kuantitatif yang pesat belum otomatis sejalan dengan kualitas kelembagaan yang kokoh. Banyak lembaga keuangan syariah masih menghadapi krisis kepercayaan, lemahnya sistem akuntabilitas, serta rendahnya transparansi dan mutu layanan .

Kondisi ini mendorong pertanyaan yang lebih mendasar:(Mujiono, 2017; Mukhlisin et al., 2019) apakah lembaga keuangan syariah kita telah dibangun di atas dasar

yang benar? Apakah nilai-nilai Islam yang menjadi identitas syariah benar-benar terwujud dalam tata kelola, sistem pelaporan, dan praktik manajerialnya? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan refleksi filosofis, karena menyangkut paradigma berpikir dan sistem nilai yang mendasari seluruh bangunan kelembagaan.

Dalam khazanah filsafat klasik, Plato pernah menyatakan bahwa keadilan tidak akan hadir dalam negara jika tidak lebih dulu hadir dalam jiwa manusia. Prinsip yang sama dapat diterapkan pada lembaga: kualitas institusi tidak dapat dilepaskan dari kualitas pandangan dunia (*worldview*) yang melandasinya. Aristoteles menambahkan bahwa kebijakan dalam tindakan (*virtue in praxis*) hanya mungkin dicapai jika seseorang memahami tujuan akhir (*telos*) dari tindakannya. Maka, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk kembali meninjau tujuan ontologis keberadaannya: bukan sekadar menghasilkan keuntungan, tetapi mewujudkan keadilan ekonomi sesuai maqashid syariah (Rifai & Asrori, 2023; Septiani et al., 2023).

Masuknya filsafat Islam pada abad pertengahan, melalui tokoh seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Ghazali, memperkaya warisan pemikiran Yunani dengan dimensi etis dan spiritual. Al-Farabi dalam karyanya “Al-Madina Al-Fadilah” menggambarkan masyarakat ideal yang dibangun di atas nilai-nilai kebijakan dan kepemimpinan yang berakal. Dalam konteks lembaga keuangan, ini bisa diterjemahkan sebagai sistem yang dikelola dengan hikmah, bukan hanya efisiensi. Ibn Sina menekankan bahwa ilmu harus berorientasi pada hikmah, yakni pengetahuan yang mengarah pada kebaikan. Sementara Al-Ghazali menempatkan niat dan keikhlasan sebagai inti dari setiap amal, termasuk dalam kegiatan ekonomi (Campbell, 2008; Huda, 2013; Ramdhani et al., 2020).

Dalam kerangka tersebut, mutu lembaga keuangan syariah tidak bisa direduksi pada standar ISO atau sertifikasi formal. Mutu adalah refleksi dari nilai-nilai yang hidup dalam sistem itu sendiri. Sayangnya, banyak lembaga yang menjalankan manajemen mutu hanya sebagai keharusan prosedural, bukan sebagai bagian dari sistem nilai yang mencerminkan keimanan dan amanah. Akibatnya, meski terstruktur dengan baik, banyak sistem manajerial di lembaga keuangan syariah gagal membentuk kepercayaan publik yang berkelanjutan (Toumi, 2020).

Kepercayaan adalah modal sosial utama dalam sistem keuangan Islam. Dalam literatur klasik, Ibn Khaldun menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dan moral dalam membentuk kekuatan ekonomi. Ia menegaskan bahwa peradaban akan bertahan selama

MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU: SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU, DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI

nilai keadilan dan amanah menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan kekuasaan dan harta. Maka, membangun lembaga keuangan syariah yang bermutu adalah juga membangun peradaban yang adil, bukan sekadar industri yang menguntungkan (Al Mamun et al., 2022). Di sinilah pendekatan filsafat ilmu memainkan peran penting. Ia mengajak kita untuk tidak hanya melihat “apa” dan “bagaimana”, tetapi juga “mengapa”. Mengapa lembaga ini harus ada? Mengapa transparansi penting dalam sistem Islam? Mengapa mutu pelayanan harus dijaga bahkan jika tidak diawasi? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut jawaban yang tidak cukup dijelaskan oleh metode manajerial semata. Diperlukan kedalaman berpikir yang menyentuh akar nilai dan tujuan.

Transparansi dalam akuntansi keuangan syariah, misalnya, bukan sekadar alat audit atau kepatuhan regulator. Dalam pandangan Islam, transparansi adalah bentuk kejujuran (*sidq*) dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyyah*). Konsep ini memiliki dimensi spiritual karena pelaporan keuangan bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan. Oleh karena itu, akuntansi syariah seharusnya dibangun atas dasar etika ilahiah, bukan sekadar mekanisme teknokratis. Masalah muncul ketika praktik pelaporan keuangan hanya fokus pada standar teknis seperti PSAK atau IFRS tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai dasar. Laporan keuangan yang tampak rapi dan lengkap belum tentu mencerminkan nilai amanah jika tidak diiringi dengan kejujuran dalam prosesnya (Lako, 2004). Konsep ini mengingatkan kita pada etika Aristotelian tentang *phronesis* (kebijaksanaan praktis) yaitu kemampuan bertindak benar bukan karena aturan, tetapi karena pemahaman moral yang mendalam (Shamsudheen et al., 2021).

Dalam Islam, etika dan spiritualitas bukan pelengkap, melainkan inti dari setiap aktivitas, termasuk dalam hal pengelolaan lembaga. Maka, manajemen mutu dalam lembaga keuangan syariah seharusnya mencerminkan *ihsan* sebuah prinsip bahwa seseorang bekerja seolah-olah ia melihat Tuhan. Ini adalah etika tertinggi dalam Islam, yang mendorong integritas lahir dan batin, meskipun tidak diawasi. Ketika nilai *ihsan* melekat dalam budaya organisasi, maka mutu tidak perlu diawasi dengan kontrol eksternal yang berlebihan. Ia akan muncul dari dalam sebagai komitmen moral. Namun, jika lembaga hanya dibentuk atas dasar insentif dan penalti, maka kualitas yang dihasilkan pun semu, mudah rapuh saat krisis melanda (Lastrian Nahulae & Aslami, 2023; Nofianti, 2012; Spengler, 1964).

Dalam kerangka ini, akuntansi keuangan dan manajemen mutu tidak dapat dipisahkan. Akuntansi adalah alat yang menunjukkan apakah mutu dikelola dengan baik. Sementara mutu tanpa akuntansi hanya akan menjadi jargon kosong. Tapi keduanya akan kehilangan makna jika tidak dibangun di atas landasan nilai. Pendekatan filsafat memungkinkan kita untuk merumuskan ulang fondasi konsep-konsep tersebut. Ia menawarkan jalan keluar dari jebakan positivistik yang melihat mutu dan laporan keuangan hanya sebagai data, bukan makna. Dalam paradigma Islam, jika data tidak sesuai maka setiap angka di dalam catatan tersebut akan membawa konsekuensi moral (Yilmaz, 2024).

Jika kita refleksikan lebih dalam, tujuan akhir dari lembaga keuangan syariah bukanlah profit, tetapi maslahat. Ini sejalan dengan konsep *maqashid al-shariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, mutu lembaga harus diukur dari seberapa besar kontribusinya terhadap lima tujuan tersebut, bukan hanya rasio keuangannya. Sayangnya, logika industri keuangan modern baik syariah maupun konvensional masih didominasi oleh paradigma utilitarian. Nilai diukur dari keuntungan. Padahal Islam tidak menolak keuntungan, tetapi meletakkannya dalam konteks etika. *Falah* (kesuksesan) dalam Islam bukan sekadar kesejahteraan material, tapi juga keberkahan dan kelestarian moral. Karena itu, reformasi lembaga keuangan syariah tidak cukup dilakukan lewat pelatihan manajemen mutu atau revisi laporan keuangan. Perlu ada rekonstruksi paradigma. Dan disinilah filsafat hadir sebagai jalan untuk menyusun kembali cara berpikir kita tentang kelembagaan (Febriadi, 2017; Saputra, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam membangun sistem keuangan yang bermutu dan berintegritas. Namun potensi ini tidak akan maksimal jika hanya bertumpu pada sistem konvensional yang dimodifikasi. Diperlukan model kelembagaan yang dibangun atas dasar nilai-nilai keislaman yang utuh. Ini bukan soal menolak Barat atau teknologi modern, tapi bagaimana menyaring dan menanamkan sistem itu ke dalam kerangka nilai Islam. Model seperti ini tidak lahir dari pendekatan pragmatis semata. Ia butuh pemikiran mendalam, penggalian makna, dan penemuan kembali arah. Inilah tugas filsafat dalam pembangunan kelembagaan Islam: menjadi peta yang menuntun ke arah kebaikan.

MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU: SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU, DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI

Tulisan ini berupaya untuk menyumbangkan kerangka berpikir tersebut. Ia ingin membuka ruang diskusi bahwa manajemen mutu dan akuntansi keuangan bukan hanya domain teknis, tetapi juga medan nilai. Dan nilai-nilai itu hanya bisa dijaga jika landasannya filosofis dan spiritual. Lembaga keuangan syariah di Indonesia harus melangkah lebih jauh dari formalitas kepatuhan syariah. Mereka harus menjadi institusi yang mencerminkan nilai adil, jujur, dan amanah secara utuh. Untuk itu, pendekatan filsafat menjadi kebutuhan, bukan pilihan.

KAJIAN TEORITIS

Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Ekonomi Syariah

Dalam membangun sistem kelembagaan yang bermutu dan berintegritas, penting untuk terlebih dahulu memahami landasan filosofis yang menopang cara berpikir kita tentang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Filsafat ilmu menjadi perangkat penting untuk menelaah secara kritis dan mendalam tentang hakikat realitas (ontologi), cara memperoleh pengetahuan (epistemologi), serta nilai-nilai apa yang seharusnya menjadi panduan dalam praktik ekonomi (aksiologi). Ketiga aspek ini menjadi pondasi dalam merumuskan sistem ekonomi Islam yang tidak sekadar berbeda secara simbolik, tetapi juga secara substansial dan paradigmatis (Yilmaz, 2024).

Dari sisi ontologi, ekonomi Islam berpijak pada pandangan bahwa realitas ekonomi tidak berdiri sendiri secara otonom, melainkan merupakan bagian dari sistem kehidupan yang utuh dan bertauhid. Segala bentuk aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai hubungan antar manusia, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak boleh hanya dipandang sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai amanah yang mengemban misi keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan. Ini berbeda secara mendasar dari pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung menempatkan entitas ekonomi dalam kerangka sekuler dan netral dari nilai-nilai moral-transenden (Yilmaz, 2024).

Pada ranah epistemologi, ekonomi Islam tidak mengandalkan rasio atau pengalaman empiris semata dalam membangun teori dan sistem, tetapi berpijak pada sumber wahyu sebagai dasar pengetahuan. Al-Qur'an dan Hadis menjadi fondasi utama, kemudian didukung oleh akal ('aql), pengalaman ('urf), dan ijtihad sebagai metode pengembangan ilmu. Sehingga sistem ekonomi Islam yang bersifat normatif dan

transendental akan tetap terbuka untuk dikembangkan melalui pendekatan rasional dan kontekstual. Hal ini menempatkan ekonomi Islam dalam posisi yang khas, yakni ilmiah sekaligus spiritual (Morgan, 1988).

Berangkat dari pendekatan epistemologis inilah kita dapat memahami mengapa indikator kinerja dalam sistem syariah tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan indikator dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, keberhasilan tidak hanya diukur dari output material seperti keuntungan atau pertumbuhan aset, tetapi juga dari ketercapaian nilai-nilai maqashid shariah. Ini menuntut pemikiran ulang terhadap indikator kinerja, pelaporan keuangan, dan ukuran mutu institusi yang digunakan.

Sementara itu, dari sudut aksiologi, ekonomi Islam secara eksplisit memuat tujuan-tujuan moral dan etis yang harus terwujud dalam sistem ekonomi dan lembaganya. Nilai-nilai seperti keadilan (*'adl*), amanah, jujur (*sidq*), tanggung jawab sosial (*mas'uliyyah*), dan ihsan menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, manajemen mutu dan akuntansi keuangan dalam lembaga keuangan syariah harus menjunjung tinggi nilai-nilai ini sebagai kerangka berpikir, bukan hanya sebagai slogan (Suripto, 2016).

Dalam filsafat Islam, tidak ada dikotomi antara nilai dan fakta. Pengetahuan selalu memiliki dimensi etis dan spiritual. Pemisahan antara ilmu dan nilai, seperti yang berkembang dalam filsafat modern Barat, tidak berlaku dalam tradisi Islam. Konsep ini sangat penting untuk dipahami ketika kita membangun sistem pelaporan keuangan dan manajemen mutu dalam lembaga keuangan syariah. Setiap angka dalam laporan keuangan membawa makna, tanggung jawab, dan konsekuensi moral.

Kritik terhadap pendekatan positivistik dalam ilmu ekonomi dan manajemen menjadi relevan dalam konteks ini. Dalam pendekatan positivistik, realitas dianggap bisa diukur dan dianalisis secara objektif tanpa terikat nilai. Namun dalam ekonomi Islam, tidak ada objektivitas yang bebas nilai. Semua aktivitas ekonomi melekat dengan nilai tauhid dan prinsip akhlak Islam. Di sinilah letak keunikan sistem ekonomi syariah yang memadukan dimensi rasional, etis, dan spiritual secara harmonis (Aryanti, 2018). Oleh karena itu, pendekatan filsafat ilmu dalam ekonomi syariah menjadi alat bantu penting untuk menilai kembali asumsi-asumsi dasar yang mungkin selama ini diterima begitu saja dalam praktik kelembagaan. Apakah standar mutu yang kita pakai benar-benar

MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU: SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU, DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI

mencerminkan nilai Islam? Apakah laporan keuangan yang kita hasilkan hanya sekadar memenuhi regulasi atau juga menjadi cerminan amanah dan kejujuran?

Pendekatan filosofis ini menghindarkan kita dari jebakan teknokratisme, yaitu kecenderungan untuk melihat mutu dan transparansi sebagai hal teknis semata. Ia mendorong lahirnya kesadaran bahwa membangun lembaga keuangan syariah adalah bagian dari proses membangun peradaban. Dan peradaban hanya akan berdiri tegak di atas fondasi nilai-nilai yang benar dan *worldview* yang kuat.

Teori Manajemen Mutu (*Total Quality Management*)

Konsep mutu dalam pengelolaan organisasi telah mengalami evolusi panjang dalam sejarah pemikiran manajemen. Awalnya, mutu hanya dipahami secara sempit sebagai kualitas produk akhir yang memenuhi standar teknis. Seiring perkembangan industri dan kompleksitas organisasi, pemahaman terhadap mutu bergeser menjadi pendekatan menyeluruh yang melibatkan proses, sistem, dan manusia di dalamnya. Pendekatan ini dikenal sebagai *Total Quality Management* (TQM) (Susanto, 2016).

TQM merupakan pendekatan manajemen strategis yang menekankan perbaikan berkelanjutan, partisipasi seluruh anggota organisasi, orientasi pada pelanggan, dan pengendalian proses. Dalam konteks kelembagaan, TQM tidak hanya membahas soal efisiensi dan efektivitas teknis, tetapi juga menyentuh aspek budaya organisasi dan kepemimpinan. Keberhasilan penerapan TQM sangat bergantung pada komitmen nilai, komunikasi, dan pembelajaran kolektif (Mundiri, 2017).

Tokoh-tokoh seperti W. Edwards Deming, Joseph Juran, dan Kaoru Ishikawa menjadi pionir dalam mengembangkan prinsip-prinsip TQM. Deming, misalnya, menekankan pentingnya kepemimpinan moral dan budaya perbaikan berkelanjutan dalam membangun mutu yang konsisten. Juran menekankan mutu sebagai bagian dari tanggung jawab manajemen puncak. Sedangkan Ishikawa memperkenalkan pentingnya perlibatan seluruh anggota organisasi dalam proses perbaikan mutu. Namun, konsep TQM yang lahir dari konteks industrial Barat tidak bisa begitu saja diadopsi ke dalam sistem lembaga keuangan syariah tanpa penyesuaian paradigma. Di sinilah pentingnya pendekatan filsafat Islam untuk meninjau ulang landasan nilai dari konsep mutu. Dalam Islam, mutu tidak hanya menyangkut kesempurnaan produk atau layanan, tetapi juga terkait dengan niat, etika, dan tanggung jawab kepada Allah dan sesama (Mundiri, 2017; Rashid et al., 2024).

Prinsip-prinsip dalam TQM sebenarnya memiliki titik temu yang erat dengan nilai-nilai Islam. Konsep *continuous improvement* sejalan dengan prinsip *islah* dalam Islam yang mendorong perbaikan terus-menerus dalam segala aspek kehidupan. Partisipasi seluruh anggota organisasi dalam menjaga mutu sejalan dengan konsep *syura*, yaitu musyawarah dan keterlibatan kolektif dalam pengambilan keputusan. Orientasi pelanggan pun sejalan dengan ajaran Islam untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesama manusia sebagai bagian dari akhlak mulia. Islam menambahkan dimensi yang tidak ada dalam kerangka TQM modern, yaitu kesadaran tauhid dan orientasi ukhrawi (Chaker & Jabnoun, 2010). Dalam perspektif Islam, mutu bukan hanya untuk kepuasan pelanggan atau keuntungan perusahaan, tetapi merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab akhirat. Konsep *ihsan* dalam Islam mendorong seseorang untuk bekerja sebaik-baiknya seolah-olah ia melihat Allah. Ini adalah standar mutu tertinggi yang tidak bisa dijangkau oleh sistem teknis semata. Karena itu, penerapan TQM dalam lembaga keuangan syariah memerlukan reinterpretasi yang mendalam agar tidak terjebak dalam sekadar formalisasi prosedur. TQM harus dibangun tidak hanya di atas prinsip manajerial, tetapi juga di atas nilai-nilai tauhid, amanah, dan akhlak. Hal ini sangat penting karena mutu dalam Islam bukan sekadar tujuan, melainkan konsekuensi dari keyakinan terhadap tanggung jawab ilahiyyah (Kwan & Isa, 2016).

Lembaga keuangan syariah yang bermutu adalah lembaga yang tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga adil, transparan, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Mutu yang dimaksud bukan hanya tentang sistem kerja yang rapi, tetapi juga sistem nilai yang hidup dalam budaya organisasi. Tanpa nilai, mutu hanya menjadi rutinitas administratif yang mudah kehilangan ruhnya (Vokshi et al., 2023). Dalam konteks ini, pendekatan filsafat sangat membantu untuk merumuskan ulang indikator mutu yang lebih holistik. Mutu dalam lembaga syariah tidak cukup diukur dari kepuasan nasabah atau kecepatan layanan, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut memberikan manfaat nyata kepada umat, menjaga integritas keuangan, dan membentuk budaya kerja yang berorientasi pada akhlak.

Prinsip *istikhlas* (perwalian manusia atas bumi) dalam Islam juga dapat menjadi landasan penting dalam manajemen mutu. Setiap pelaku lembaga keuangan syariah bertanggung jawab tidak hanya kepada manajer atau regulator, tetapi kepada Allah sebagai pemilik hakiki atas seluruh harta dan amanah. Maka sistem mutu yang dibangun

MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU: SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU, DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI

harus mampu menginternalisasi nilai pertanggungjawaban ilahiyah dalam seluruh proses kerja. Kesadaran ini dapat membentuk budaya organisasi yang bermutu secara spiritual dan struktural. Karyawan tidak lagi bekerja hanya karena pengawasan atasan, tetapi karena kesadaran akan amanah. Laporan mutu tidak hanya disusun untuk audit eksternal, tetapi juga sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral kepada masyarakat dan Tuhan (Mundiri, 2017).

Akuntansi Keuangan dan Prinsip Transparansi Berbasis Nilai

Akuntansi keuangan merupakan sistem pencatatan dan pelaporan yang berperan penting dalam menjaga akuntabilitas organisasi, termasuk lembaga keuangan syariah. Namun dalam praktiknya, akuntansi seringkali hanya dilihat sebagai alat teknis untuk memenuhi kewajiban regulasi atau menyusun laporan keuangan tahunan. Pandangan sempit ini membuat akuntansi kehilangan ruh etis dan filosofisnya sebagai instrumen pertanggungjawaban (Batubara, 2019; Kamaruddin & Siregar, 2022).

Dalam perspektif sejarah, akuntansi muncul dari kebutuhan manusia untuk mencatat kepemilikan, transaksi, dan pengelolaan sumber daya. Sejak peradaban Mesopotamia, Mesir Kuno, hingga Romawi, akuntansi telah berfungsi bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga sebagai alat legitimasi dan perlindungan kepentingan masyarakat. Di masa Islam klasik, praktik pencatatan keuangan bahkan sudah dilakukan oleh para petugas baitul maal dan bendahara negara Islam dengan standar moral yang tinggi (Batubara, 2019; Kamaruddin & Siregar, 2022).

Filsafat akuntansi mulai dibahas secara serius dalam dunia modern ketika muncul pertanyaan: apakah akuntansi hanya alat teknis netral, ataukah ia mencerminkan nilai dan pandangan dunia tertentu? Dalam tradisi filsafat Barat, pertanyaan ini dijawab dengan berbagai pendekatan, mulai dari positivistik yang menekankan objektivitas angka, hingga pendekatan kritis yang melihat akuntansi sebagai representasi relasi kuasa dalam masyarakat (Arwani, 2016). Di sinilah perlu adanya pengembangan akuntansi keuangan yang tidak hanya berlandaskan aturan, tetapi juga dilandasi oleh prinsip nilai. Dalam Islam, akuntansi tidak bisa dipisahkan dari konsep pertanggungjawaban moral (*hisab*) dan kejujuran (*amanah*). Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi perwujudan dari akhlak dan tauhid. Maka, laporan keuangan bukan hanya untuk auditor atau regulator, tetapi juga untuk Allah dan masyarakat luas (Faiz, 2014).

Konsep *al-shidq* (kejujuran) dan *amanah* (kepercayaan) dalam Islam menjadi pilar utama dalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan. Ketika seseorang mencatat transaksi, ia tidak hanya berinteraksi dengan angka, tetapi sedang memanifestasikan integritas dirinya. Begitu pula dalam pelaporan, transparansi bukan semata membuka data, tetapi memastikan data tersebut mencerminkan realitas yang utuh dan tidak disamarkan (Faiz, 2014). Akuntansi keuangan dalam lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan lembaga konvensional. Ia tidak hanya menyajikan posisi harta dan kewajiban, tetapi juga menggambarkan sejauh mana lembaga tersebut menjalankan prinsip-prinsip syariah secara nyata (Triyuwono, 2017). Misalnya, pembagian hasil usaha, pengelolaan dana zakat, dan pembiayaan berbasis akad harus dilaporkan secara jujur dan mudah dipahami publik. Dalam hal ini, prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *adl* (keadilan) menjadi penimbang penting dalam penyusunan standar pelaporan. Jika laporan keuangan disusun dengan itikad menutupi risiko, menyembunyikan beban, atau membesar-besarkan keuntungan, maka praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai inti dalam Islam. Transparansi sejati adalah ketika lembaga berani membuka kekurangan demi perbaikan yang berkelanjutan (Kamaruddin & Siregar, 2022).

Filsafat Islam menolak dikotomi antara aspek teknis dan aspek moral. Akuntansi tidak bisa dianggap netral. Setiap angka adalah representasi dari realitas sosial dan keputusan etis. Oleh karena itu, pengembangan akuntansi dalam lembaga syariah harus didasarkan pada *maqashid al-shariah* tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan harta, keadilan transaksi, dan keseimbangan sosial. Dalam praktik internasional, konsep akuntansi berbasis nilai mulai mendapatkan tempat, terutama dengan munculnya standar pelaporan keuangan Islam yang dikembangkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) (Arwani, 2016). Namun, penerapan standar ini masih bersifat formal di banyak lembaga. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya akuntansi lembaga keuangan syariah.

Transparansi sejati tidak cukup diwujudkan melalui kelengkapan laporan. Ia menuntut keberanian untuk jujur, bahkan terhadap hal-hal yang bisa mengurangi citra institusi. Kejujuran semacam ini hanya bisa tumbuh jika pelaku akuntansi memiliki kesadaran spiritual bahwa ia tidak hanya sedang bekerja untuk lembaga, tetapi sedang

MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU: SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU, DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI

menyusun catatan amal yang kelak akan diperiksa di hadapan Tuhan (Abdillah, 2022). Dalam filsafat akuntansi Islam, laporan keuangan memiliki dimensi eskatologis. Ini berarti bahwa laporan tidak hanya diperiksa oleh manusia, tetapi juga memiliki nilai dalam kehidupan akhirat. Kesadaran ini menjadi fondasi kuat bagi transparansi yang bermakna. Bukan karena takut sanksi, tetapi karena ingin menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Konsep Tauhid sebagai *Worldview* Penggerak Sistem

Tauhid dalam Islam bukan sekadar pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa, melainkan merupakan landasan utama dalam membangun seluruh sistem kehidupan, termasuk dalam praktik ekonomi, manajemen mutu, dan akuntansi keuangan. Tauhid adalah titik pangkal yang menyatukan seluruh aspek kehidupan manusia dalam satu kesadaran ilahiah. Dalam konteks kelembagaan, tauhid menjadi *worldview* kerangka berpikir dan paradigma yang menjiwai arah kebijakan, budaya organisasi, dan pengambilan keputusan (Susilowati, 2017).

Worldview tauhid tidak bersifat abstrak dan terpisah dari kenyataan, melainkan terintegrasi dalam tindakan nyata. Dalam sejarah peradaban Islam, konsep ini menjadi landasan kuat yang melahirkan sistem sosial dan ekonomi yang adil, jujur, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama. Tauhid melahirkan kesadaran bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang bertugas untuk menegakkan keadilan, menjaga amanah, dan menolak segala bentuk penindasan serta ketidakjujuran (Sokarina, 2020).

Dalam lembaga keuangan syariah, penerapan prinsip tauhid mendorong setiap bagian dari organisasi untuk bergerak secara harmonis menuju tujuan ilahiah. Visi kelembagaan tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi pada keberkahan dan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat. Keputusan-keputusan strategis, pengelolaan dana, hingga penyusunan laporan keuangan semuanya harus selaras dengan nilai-nilai tauhid: kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kedulian sosial (Aryanti, 2018).

Dari sisi manajemen mutu, tauhid memosisikan kualitas bukan sekadar tentang efisiensi atau kepuasan pelanggan, tetapi tentang upaya menjalankan tugas sebaik mungkin karena Allah melihat semua amal manusia. Kualitas dalam kerangka tauhid adalah kualitas yang lahir dari kesadaran batin, bukan tekanan eksternal. Inilah yang

membuat *Total Quality Management* (TQM) dalam konteks Islam tidak hanya menekankan standar kerja, tapi juga spiritualitas kerja. Begitu juga dalam akuntansi, worldview tauhid menjadikan proses pencatatan keuangan sebagai bentuk ibadah. Setiap angka yang dicatat, setiap aset yang diungkap, bukan sekadar informasi ekonomi, tetapi juga jejak moral yang harus dipertanggungjawabkan. Jika dalam sistem sekuler, transparansi adalah tuntutan publik, maka dalam sistem Islam, transparansi adalah bagian dari penghambaan kepada Tuhan. Tauhid juga menolak fragmentasi nilai. Tidak ada dikotomi antara dunia kerja dan nilai-nilai keimanan. Segala aktivitas ekonomi termasuk manajemen lembaga keuangan harus mencerminkan keutuhan pandangan hidup Islam. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah seharusnya tidak hanya berbeda secara nama dan akad, tetapi juga dalam cara berpikir, budaya kerja, dan arah tujuannya (Putra, 2020).

Pendekatan tauhid mengembalikan makna spiritual dalam manajemen dan akuntansi. Ketika lembaga menyadari bahwa sistem yang dibangun bukan semata untuk kelangsungan bisnis, melainkan sebagai sarana pengabdian kepada Allah, maka seluruh lini organisasi akan berusaha menyatukan niat, tindakan, dan hasil kerja dalam kerangka nilai luhur. Konsep *ihsan* berbuat yang terbaik walaupun tidak diawasi manusia merupakan perwujudan paling konkret dari tauhid dalam kehidupan organisasi. Seorang pegawai yang memiliki kesadaran tauhid tidak akan melakukan kecurangan walau tidak diaudit. Manajer yang bertauhid akan menolak praktik manipulatif meski itu bisa memperindah laporan. Direksi yang bertauhid akan melihat pemegang saham bukan sebagai satu-satunya pemilik hak, tetapi juga masyarakat dan Allah sebagai pemilik mutlak. Dalam filsafat Islam, pandangan dunia tauhid juga menjadi jawaban atas persoalan etika dan nilai dalam dunia modern yang cenderung relativistik. Di saat sistem kapitalistik seringkali menjadikan profit sebagai satu-satunya tujuan, konsep tauhid menawarkan kerangka moral yang kokoh dan konsisten. Ia memberikan arah dan batas bagi inovasi, serta memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak menabrak keadilan dan kemanusiaan (Abdelwahed et al., 2024; Maali & Napier, 2010).

METODE PENELITIAN

. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian konseptual. Tujuannya adalah menyusun sintesis pemikiran normatif dan reflektif mengenai keterkaitan antara nilai-nilai Islam, prinsip manajemen mutu, dan akuntansi

MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU: SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU, DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI

keuangan syariah. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi pustaka dari buku akademik, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, PSAK Syariah, serta laporan tahunan lembaga keuangan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur yang relevan dan terkuras (Miles & Huberman, 2020).

Analisis dilakukan secara reflektif dan iteratif untuk mengidentifikasi konsep kunci, menelusuri hubungan antar konsep, dan membangun kerangka konseptual. Model penelitian yang dikembangkan bersifat naratif-konseptual, menggambarkan hubungan antara pandangan dunia Islam (tauhid), sistem mutu berbasis nilai, prinsip akuntansi syariah, dan kepercayaan publik. Validitas kajian ditunjukkan melalui koherensi logis, kedalaman sintesis, dan relevansi normatif terhadap konteks aktual lembaga keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Ontologis: Mendasarkan Lembaga Keuangan Syariah pada Realitas Nilai dan Kebenaran

Setiap sistem kelembagaan lahir dari pandangan tertentu tentang hakikat realitas (*ontology*). Dalam filsafat ilmu, ontologi adalah cabang yang menjawab pertanyaan tentang “apa yang nyata” dan “apa yang menjadi dasar keberadaan.” Ketika kita membicarakan lembaga keuangan syariah, pertanyaan ontologis ini menjadi sangat penting. Apakah lembaga ini hanya entitas ekonomi yang mencari profit, ataukah ia juga entitas nilai yang merepresentasikan etika, keadilan, dan tauhid sebagai inti spiritualnya?

Dalam pandangan Islam, realitas tidaklah sekadar fisik dan empiris, tetapi mencakup yang metafisik. Realitas keuangan bukan hanya transaksi antara dua pihak, tetapi juga merupakan bagian dari hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Di sinilah perbedaan ontologis antara sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah menjadi terang. Dalam sistem syariah, keberadaan lembaga keuangan dibangun atas dasar amanah (*trust*), keadilan ('*adl*), dan kesatuan nilai hidup (tauhid). Ontologi tauhidi ini menjadikan lembaga keuangan bukan sekadar aktor ekonomi, tetapi juga pelayan umat dan penjaga keseimbangan sosial (Sokarina, 2020).

Jika kita bandingkan dengan filsafat Yunani kuno, misalnya dalam pemikiran Plato, ada pembagian antara dunia ide (realitas hakiki) dan dunia inderawi (realitas semu). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, realitas idealnya adalah sistem yang mencerminkan nilai-nilai Ilahiah. Maka sistem keuangan syariah yang hanya menjalankan teknis perbankan tanpa nilai etik dan spiritual, bisa dikatakan belum menyentuh ontologi sejatinya. Hal yang sama disinggung oleh Al-Farabi ketika menyatakan bahwa negara ideal adalah yang dipimpin oleh hikmah dan nilai-nilai luhur analogi ini juga berlaku untuk lembaga keuangan yang ideal (Huda, 2013; Putra, 2020).

Ontologi lembaga syariah juga menekankan pentingnya *maqasid al-shariah* sebagai kerangka nilai yang harus mewarnai keberadaannya. Keberadaan suatu lembaga tidak bisa dipisahkan dari tujuannya untuk menjaga agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Maka keberadaan lembaga keuangan syariah harus diarahkan untuk memastikan perlindungan ini tercapai secara holistik, bukan semata-mata menghasilkan keuntungan atau menunjukkan kinerja finansial. Pendekatan ontologis ini, maka lembaga keuangan syariah yang bermutu harus dimulai dari pemahaman akan realitas keberadaannya yang terikat nilai (Saputra, 2021; Zaki & Cahya, 2015). Mutu tidak hanya dilihat dari efisiensi atau kepuasan pelanggan, tetapi juga dari kesesuaian eksistensial dengan nilai-nilai syariah. Ini membawa kita pada definisi mutu yang melampaui ukuran-ukuran teknis. Mutu sejati dalam konteks syariah adalah mutu eksistensial mutu yang selaras dengan hikmah penciptaan dan tujuan syariah.

Ontologi ini juga membedakan orientasi kebijakan dan struktur kelembagaan. Lembaga keuangan yang memahami realitas keberadaannya sebagai perpanjangan dari sistem nilai Ilahiah akan lebih berhati-hati dalam mengelola dana, lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan, dan lebih berorientasi pada maslahat publik daripada pada akumulasi modal. Transparansi tidak hanya menjadi alat teknis, melainkan manifestasi dari nilai *sidq* (kejujuran), amanah (kepercayaan), dan taqwa (kesadaran moral). Dalam praktik manajemen mutu, perspektif ontologis ini menuntut redefinisi indikator kualitas. Standar mutu tidak cukup hanya berdasarkan kecepatan pelayanan atau efisiensi sistem, tetapi juga harus mencakup nilai-nilai spiritual dan sosial. Maka model penilaian mutu dalam lembaga keuangan syariah

MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU: SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU, DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI

perlu dibangun dengan kerangka yang berakar pada prinsip-prinsip ontologis Islam. Secara historis, Miskawayh dalam *Tahdzib al-Akhlaq* menyatakan bahwa keutamaan (virtue) menjadi dasar utama dalam struktur masyarakat yang baik. Diterapkan pada konteks kekinian, virtue tersebut bisa diterjemahkan ke dalam nilai-nilai institusional seperti kejujuran dalam pencatatan akuntansi, kesetiaan pada prinsip syariah dalam kebijakan manajerial, dan kesadaran sosial dalam distribusi manfaat (Febriadi, 2017; Zaki & Cahya, 2015).

2. Epistemologi: Pengetahuan, Justifikasi, dan Mekanisme Kontrol dalam Sistem Syariah

Epistemologi, sebagai cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan, kebenaran, dan justifikasinya, memiliki implikasi mendalam dalam konstruksi lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, epistemologi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana lembaga memperoleh informasi atau data, melainkan bagaimana proses pengetahuan tersebut dibingkai, divalidasi, dan dioperasionalisasikan dalam sistem nilai Islam (Batubara, 2019; Nofianti, 2012).

Dalam kerangka keilmuan Islam, sumber pengetahuan tidak terbatas pada empirisme dan rasionalisme, tetapi mencakup wahyu (revelasi). Artinya, lembaga keuangan syariah tidak hanya mengandalkan logika dan data statistik dalam mengambil keputusan, tetapi juga terikat pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber epistemologis utama. Ini menjadikan sistem syariah sebagai sistem epistemologis yang bersifat transendental berakar pada nilai Ilahiah namun beroperasi dalam realitas empiris (Kamaruddin & Siregar, 2022).

Dalam sistem konvensional, mekanisme kontrol dan justifikasi keputusan biasanya berbasis pada prinsip-prinsip legal formal dan rasionalitas ekonomi. Namun, epistemologi syariah memunculkan mekanisme kontrol yang bersifat moral dan spiritual. Misalnya, keputusan dalam penyaluran dana harus mempertimbangkan aspek halal-haram, kemaslahatan, dan keadilan, bukan sekadar risiko dan return. Pengetahuan tentang halal-haram ini bukan hasil analisis statistik semata, melainkan hasil istinbath dari sumber-sumber syariah yang otoritatif (Kamaruddin & Siregar, 2022).

Model epistemologi ini juga berdampak pada bagaimana akuntabilitas dan transparansi dipahami. Transparansi bukan sekadar keterbukaan administratif, melainkan manifestasi dari nilai *tazkiyah* (penyucian diri) dan *muraqabah* (kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi). Ini yang membedakan transparansi dalam sistem syariah dengan sistem sekuler yang pertama bersifat internal dan berbasis iman, sedangkan yang kedua cenderung eksternal dan berbasis regulasi.

Dalam praktik akuntansi, epistemologi Islam menuntut adanya nilai-nilai kejujuran (*sidq*), keadilan ('*adl*), dan pertanggungjawaban moral. Laporan keuangan dalam lembaga syariah tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan pemegang saham semata, tetapi harus menjadi cerminan kondisi riil lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat. Ini menuntut adanya keilmuan akuntansi yang bersifat integratif, bukan sekadar teknis atau prosedural. Sebagai contoh, proses penilaian risiko dalam lembaga keuangan syariah tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan moral (Arwani, 2016; Kamaruddin & Siregar, 2022). Di sinilah *ijtihad epistemik* dibutuhkan yakni kemampuan untuk mengolah dan menafsirkan data dengan pendekatan nilai. Pengetahuan dalam konteks ini bukan netral, tetapi bermuatan etika. Pengetahuan yang digunakan untuk mengambil keputusan keuangan harus memenuhi standar *maqasid al-shariah*, bukan hanya efisiensi ekonomi. Kembali pada kerangka filsafat, dalam pemikiran Kant, ada perbedaan antara *a priori* dan *a posteriori*. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *a priori* dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip syariah yang sudah *given* (diketahui sebelumnya), sedangkan *a posteriori* adalah data empiris yang digunakan untuk menyesuaikan implementasi prinsip tersebut dalam konteks kekinian. Relasi antara keduanya harus bersifat harmonis dan integratif, bukan saling menegasi (Susilowati, 2017; Triuwono, 2017).

Dalam pendekatan kontemporer, epistemologi Islam bahkan mengedepankan integrasi antara wahyu dan akal. Maka dalam lembaga keuangan syariah yang bermutu, manajemen tidak hanya didasarkan pada pelatihan teknis, tetapi juga pada penguatan epistemologi nilai. Keputusan strategis yang diambil harus melewati proses justifikasi ilmiah dan syar'i secara bersamaan. Hal ini menuntut transformasi manajemen mutu dalam lembaga keuangan syariah. Sistem penjaminan mutu tidak bisa hanya memakai standar ISO atau manajemen modern barat tanpa adanya

MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU: SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU, DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI

epistemological grounding. Sistem mutu harus dikembangkan dari epistemologi Islam yang menjadikan akuntabilitas spiritual sebagai dasar utama (Faiz, 2014; Lako, 2004).

3. Aksiologi: Mutu dan Transparansi sebagai Etika Institusional

Aksiologi dalam filsafat membahas tentang nilai dan etika—apa yang dianggap baik, benar, dan pantas. Dalam konteks pembangunan lembaga keuangan syariah yang bermutu, aksiologi bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi dari seluruh sistem operasional. Nilai bukan sesuatu yang ditambahkan belakangan, tetapi menjadi kerangka orientatif sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi lembaga itu sendiri.

Dalam kerangka Islam, nilai (*qiyām*) tidak berdiri sendiri sebagai preferensi individu atau budaya lokal, tetapi berakar dari prinsip-prinsip tauhid dan *maqasid al-shariah*. Inilah yang membedakan aksiologi Islam dengan pendekatan sekuler: nilai dalam Islam bersifat absolut, bukan relatif, karena diturunkan dari wahyu dan akhlak Rasulullah SAW. Maka, mutu dan transparansi dalam lembaga keuangan syariah tidak sekadar "baik secara teknis", tetapi harus "benar secara etik dan spiritual".

Konsep mutu (*quality*) dalam perspektif aksiologis Islam tidak hanya diukur dari efisiensi operasional atau kepuasan nasabah, tetapi juga pada seberapa jauh lembaga itu menjalankan prinsip *amanah*, *'adl* (keadilan), *ihsan* (*excellence*), dan *maslahah* (kemanfaatan). Oleh karena itu, mutu dalam Islam bersifat holistik: mencakup mutu produk, mutu pelayanan, mutu hubungan dengan stakeholder, dan mutu hubungan dengan Allah SWT. Jika merujuk pada pemikiran filsuf Yunani seperti Plato, keutamaan (*virtue*) adalah fondasi dari keadilan dan kebijakan sosial. Dalam konteks lembaga, prinsip-prinsip etis ini harus dilembagakan dalam sistem manajemen mutu. Maka, mutu bukan hanya hasil dari sistem prosedural dan manajerial, tetapi juga dari nilai-nilai luhur yang diinternalisasi oleh seluruh pelaku organisasi. Seorang akuntan, misalnya, tidak hanya harus kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran etik sebagai *madinah al-fadhilah* versi kelembagaan. Transparansi pun demikian. Dalam sistem sekuler, transparansi seringkali dipahami secara administratif: menyediakan laporan, membuka data, dan tunduk pada regulasi. Namun dalam Islam, transparansi adalah wujud dari *sidq*

(kejujuran), *amanah* (kepercayaan), dan *muraqabah* (kesadaran diawasi oleh Allah). Ini menjadikan transparansi sebagai nilai ibadah, bukan sekadar kewajiban hukum. Maka ketika seorang pemimpin lembaga syariah membuat keputusan secara terbuka dan akuntabel, itu bukan hanya bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga *taqarrub* kepada Allah.

Dalam praktiknya, aksiologi Islam menuntut adanya pembudayaan nilai secara sistematis dalam organisasi. Budaya kerja harus dibentuk bukan hanya dari SOP (*standard operating procedures*), tetapi dari nilai-nilai spiritual yang dijadikan prinsip hidup bersama. Dalam pendekatan *Total Quality Management* (TQM), ini disebut sebagai *value-based leadership*, namun dalam Islam, konsep serupa lebih dalam: yakni *qiyyam al-qiyadah* (kepemimpinan berbasis nilai-nilai Ilahiyyah).

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan nilai-nilai Islam secara autentik, bukan sekadar simbolik, cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Hal ini dapat dipahami karena publik Indonesia, sebagai masyarakat beragama, menilai integritas bukan hanya dari performa lembaga, tetapi juga dari nilai-nilai yang diyakini dan dijalankan oleh lembaga tersebut. Aksiologi juga menjadi titik temu antara teori dan praksis. Dalam filsafat ilmu, ini adalah wilayah di mana pengetahuan diterjemahkan menjadi tindakan yang bermakna. Maka sistem mutu dan transparansi dalam lembaga syariah harus bersumber dari epistemologi yang sahih, dan dioperasionalisasikan dalam aksiologi yang bernilai. Tanpa aksiologi, sistem akan kehilangan jiwa yang tersisa hanyalah rutinitas mekanis tanpa arah moral. Contoh konkret dari penerapan aksiologi dalam lembaga keuangan syariah adalah penolakan terhadap praktik riba, meskipun secara ekonomi dianggap menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa nilai lebih tinggi dari sekadar logika bisnis. Keputusan ini bukan karena tidak rasional, melainkan karena etika Islam menganggap riba sebagai bentuk ketidakadilan yang merusak tatanan sosial. Di sinilah etika menjadi filter dari segala bentuk keputusan lembaga.

Sistem mutu dan transparansi yang diharapkan dalam lembaga keuangan syariah bukanlah sistem netral, tetapi sistem yang dibimbing oleh nilai-nilai Islam. Nilai-nilai tersebut bukan hanya untuk dicantumkan dalam visi-misi lembaga, tetapi harus menjadi roh yang menggerakkan seluruh aktivitas kelembagaan, dari pimpinan hingga pelaksana teknis. Dalam peradaban Islam klasik, para ulama seperti Al-Farabi,

MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU: SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU, DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI

Al-Ghazali, hingga Ibn Khaldun telah menekankan pentingnya *akhlak* dan *hikmah* dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi yang adil dan bermutu. Maka, membangun lembaga keuangan syariah yang bermutu dan transparan sejatinya adalah bentuk aktualisasi dari warisan peradaban ini menggabungkan etika, ilmu, dan kepemimpinan dalam satu bangunan institusional yang utuh.

4. Rekonstruksi Sistem: Integrasi Mutu, Akuntansi, dan Nilai Tauhid sebagai Jalan Membangun Kepercayaan Publik

Dalam dinamika pembangunan institusi keuangan syariah yang bermutu, tantangan terbesar bukan hanya terletak pada aspek teknis dan manajerial, tetapi pada bagaimana menyatukan aspek-aspek tersebut ke dalam satu kesatuan sistemik yang bersumber dari tauhid. Subbab ini menyajikan suatu rekonstruksi sistem, yakni upaya merumuskan kembali struktur dan dinamika kelembagaan melalui integrasi tiga unsur utama: manajemen mutu (*quality management*), akuntansi keuangan berbasis nilai, dan pandangan hidup tauhid (*tauhidic worldview*).

Dalam filsafat ilmu, rekonstruksi merupakan proses dialektik di mana sebuah bangunan pengetahuan atau sistem dibongkar untuk di inspeksi elemen-elemennya, lalu disusun kembali dengan prinsip yang lebih utuh dan bermakna. Rekonstruksi ini mirip dengan pendekatan hermeneutika Gadamer: bukan hanya memahami bagian dari keseluruhan, tetapi membentuk pemahaman baru yang lebih mendalam melalui dialog antara nilai lama dan realitas baru. Dalam konteks ini, sistem kelembagaan keuangan syariah direkonstruksi melalui dialog antara prinsip-prinsip modern (mutu dan akuntansi) dan nilai-nilai inti Islam (tauhid dan *maqasid al-shariah*).

Pertama, manajemen mutu (TQM) memberikan kerangka kerja tentang bagaimana institusi dapat mengelola proses dan sumber daya secara efektif dan efisien. Namun, pendekatan ini seringkali bersifat netral nilai dan berorientasi pasar. Maka dibutuhkan penyuntikan nilai-nilai ke dalamnya, agar mutu bukan sekedar performa, tetapi etika dan amanah. Dalam kerangka tauhid, mutu bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai *ridha Allah*. Dengan demikian, indikator mutu tidak berhenti pada output, tetapi juga pada *niyyah* (niat), proses, dan dampaknya terhadap keadilan sosial.

Kedua, sistem akuntansi keuangan yang selama ini dominan dalam bentuk standar internasional (seperti IFRS atau PSAK) memiliki kekuatan dalam hal akurasi dan transparansi data. Namun, akuntansi dalam Islam tidak hanya mencatat, tetapi juga menilai dan menimbang dari sisi halal-haram, *maslahat-mudharat*, serta etika kebermanfaatan. Maka, akuntansi keuangan dalam kerangka Islam tidak bisa dilepaskan dari nilai: *hisab*, *syahadah*, dan *amanah* menjadi prinsip spiritual dari profesi akuntansi. Dalam filsafat Islam, ini merupakan integrasi antara logika (*mantiq*) dan etika (*akhlaq*).

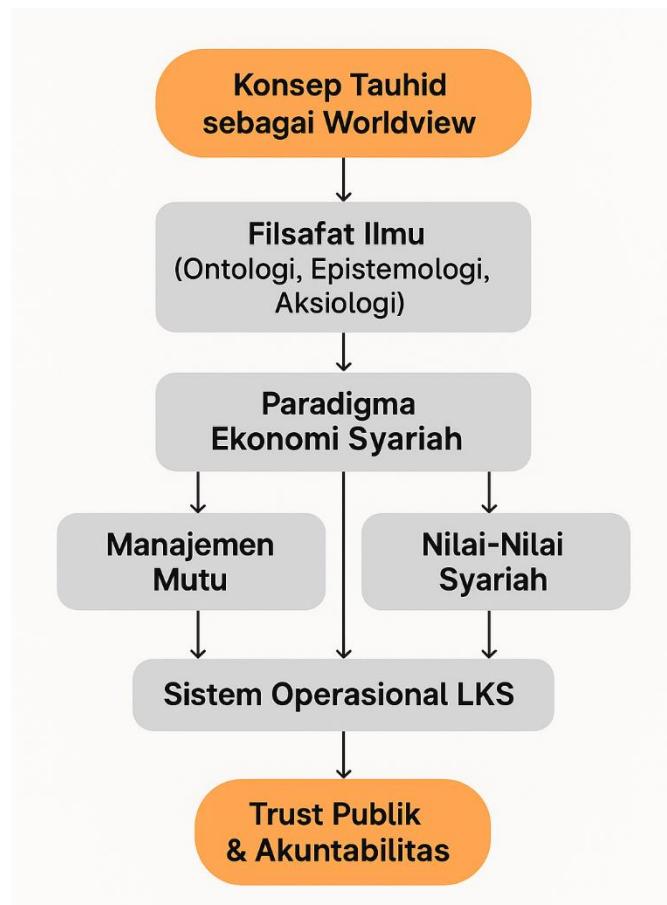
Ketiga, nilai tauhid sebagai pandangan hidup (*worldview*) tidak hanya menjadi fondasi teologis, tetapi juga basis sistemik yang mengarahkan keseluruhan aktivitas kelembagaan. Tauhid menyatukan antara realitas yang kasat mata (operasional) dan yang gaib (nilai-nilai Ilahiyyah), sehingga menciptakan sistem yang tidak dualistik. Dalam paradigma sekuler, efisiensi dan etika seringkali dipisahkan. Namun dalam tauhid, keduanya melebur menjadi satu kesatuan, karena Allah adalah *Rabb al-'Alamin*, pengatur seluruh alam semesta, termasuk institusi-institusi manusia.

Ketika ketiga unsur ini mutu, akuntansi, dan tauhid diintegrasikan, maka lahirlah sebuah sistem yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga kuat secara moral. Sistem ini menjadi *sulhiyyah*, yakni mempertemukan aspek '*amal* (praktik) dengan '*ilm* (pengetahuan) dan *iman* (keyakinan). Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah akan mengembangkan standar mutu yang berbasis *maqasid*, menyusun laporan keuangan yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, serta menjadikan visi tauhid sebagai arah kebijakan kelembagaan.

Hasil sintesis dari lapangan menunjukkan bahwa integrasi ini bukan sekadar teori, melainkan kebutuhan nyata. Banyak lembaga keuangan syariah yang kehilangan kepercayaan publik justru karena ketidakkonsistenan antara nilai yang diklaim dan praktik yang dijalankan. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem berbasis nilai menjadi langkah penting untuk mengembalikan *trust*, karena publik tidak hanya melihat performa, tetapi juga komitmen moral dan spiritual dari lembaga tersebut.

Dalam kerangka ini, model integratif yang ditawarkan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa trust publik adalah *output* dari sistem yang bermutu, akuntabel, dan bernilai tauhid.

MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU: SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU, DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI



Gambar 1. Model Integratif

Kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang bisa dikonstruksi secara kosmetik, tetapi harus dibangun melalui sistem yang sahih secara substansi. *Trust* menjadi bentuk *maqasid* dari sistem itu sendiri: tanda bahwa sistem telah bekerja secara adil, transparan, dan bermakna. Sebagai refleksi filosofis, model rekonstruksi ini merepresentasikan pendekatan *teleologis* (berorientasi tujuan) dan *deontologis* (berorientasi kewajiban), yang disatukan dalam kerangka tauhid. Dalam istilah Al-Ghazali, sistem ini adalah bentuk dari '*adl*', yakni harmoni antara hukum, nilai, dan praktik yang menuntun kepada kemaslahatan bersama. Maka pembangunan lembaga keuangan syariah yang bermutu dan terpercaya bukanlah sekadar proyek institusional, tetapi juga misi peradaban: membangun dunia yang lebih adil, transparan, dan ilahiyyah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi ini merumuskan sebuah model konseptual integratif yang menjembatani antara pendekatan filsafat ilmu, teori manajemen mutu, prinsip-prinsip akuntansi keuangan berbasis nilai, serta konsep tauhid sebagai landasan etis dan spiritual. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk merancang sebuah kerangka teoritis dalam membangun lembaga keuangan syariah yang bermutu dan memiliki sistem transparansi yang kuat, demi menumbuhkan kepercayaan publik secara berkelanjutan. Temuan konseptual menunjukkan bahwa integrasi antara filsafat ontologis kelembagaan, epistemologi keilmuan yang berbasis nilai Islam, serta aksiologi praksis yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, mampu memberikan arah baru bagi penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam konteks ini, tauhid tidak hanya menjadi dasar keimanan, tetapi juga menjadi *worldview* yang memengaruhi cara institusi beroperasi, menetapkan standar mutu, serta menyusun laporan keuangan secara jujur dan bertanggung jawab.

Saran

Pada artikel ini hanya bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris, namun pendekatan interdisipliner yang digunakan memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan literatur-literatur terkait. Keterbatasan utama dari kajian ini terletak pada absennya validasi lapangan yang dapat menguji efektivitas model dalam konteks kelembagaan yang beragam. Oleh karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk menguji model ini secara kualitatif maupun kuantitatif di berbagai jenis lembaga keuangan syariah, baik yang berskala nasional maupun lokal. Selain itu, dibutuhkan eksplorasi lebih lanjut terhadap dinamika implementasi nilai-nilai tauhid dalam praktik audit, pelaporan keuangan, dan pengambilan keputusan strategis. Dengan penguatan pada aspek spiritualitas kelembagaan dan kualitas teknis manajerial, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menjadi institusi yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdelwahed, N. A. A., Al Doghan, M. A., Saraih, U. N., & Soomro, B. A. (2024). Unleashing potential: Islamic leadership's influence on employee performance via Islamic organizational values, organizational culture and work motivation. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-01-2024-0019>

**MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU:
SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU,
DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI**

- Abdillah, S. O. S. (2022). Akuntansi Syariah Sebagai Orientasi Di Masa Depan Dalam Perwujudan Nilai Amanah, Kebenaran, Dan Keadilan. *Akuntabilitas*, 15(2), 1–15.
- Al Mamun, A., Sinanoğlu, B., & Uddin, M. S. (2022). Ibn Khaldun's Economic Theories Revisited. *Journal of Islamic Economics*, 2(2), 25–47.
- Arwani, A. (2016). Rancang Bangun Akuntansi Syari'ah. *Hikmatuna*, 2(1), 22–50.
- Aryanti, Y. (2018). Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi dan Politik. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2(2).
- Batubara, Z. (2019). Akuntansi Dalam Pandangan Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 66–77. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.163>
- Campbell, R. A. (2008). Leadership succession in early Islam: Exploring the nature and role of historical precedents. *Leadership Quarterly*, 19(4), 426–438. <https://doi.org/10.1016/j.lequa.2008.05.007>
- Chaker, M. N., & Jabnoun, N. (2010). Barriers to service quality in Islamic banks in Qatar. *International Journal of Commerce and Management*, 20(4), 296–307. <https://doi.org/10.1108/10569211011094622>
- Faiz, I. A. (2014). Perekayaan Kerangka Konseptual Akuntansi Dalam Pandangan Islam. *Addin*, 8(1), 81–106.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Huda, C. (2013). Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 103–124.
- Kamaruddin, & Siregar, S. (2022). Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional: Komparasi Nyata Dari Tinjauan Literature. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1364–1372. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5427>
- Kwan, C. S., & Isa, F. M. (2016). The relationship between leadership, span of control, perception of islamic products and services, perception of internal service quality and the agents' job satisfaction:A case of unit trust agents in johor bahru. *International Review of Management and Marketing*, 6(8Special I), 149–152.
- Lako, A. (2004). Peran Filsafat Ilmu Sebagai Fondasi Utama Pengembangan Ilmu (Teori) Akuntansi. *Bisnis Dan Akuntansi*, 6(2), 157–188.

- Lastrian Nahulae, L., & Aslami, N. (2023). Menerapkan Prinsip-prinsip Manajemen Perubahan Islami: Membentuk Budaya Organisasi yang Responsif dan Adaptif. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(3). <https://doi.org/10.30640/digital.v2i2.1275>
- Maali, B., & Napier, C. (2010). Accounting, religion and organisational culture: the creation of Jordan Islamic Bank. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1(2), 92–113. <https://doi.org/10.1108/17590811011086705>
- Miles, H., & Huberman, A. M. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. In *New York: Sage Publications, Inc* (4th ed.). Sage Publications. Inc.
- Morgan, G. (1988). Accounting as reality construction: towards a new epistemology for accounting practice. *Accounting, Organizations and Society*, 13(5), 477–485.
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 207–215.
- Mukhlisin, M., Mujahidin, E., & Indupurnahayu, I. (2019). Filantropi Islam sebagai Strategi Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v1i1.2702>
- Mundiri, A. (2017). Organizational Culture Base On Total Quality Management In Islamic Educational Institution. *ADRI International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(1), 1–11.
- Nofianti, L. (2012). Kajian Filosofis Akuntansi: Seni, Ilmu atau Teknologi. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 4(3), 203–210. <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/1474/1450>
- Putra, R. I. P. W. (2020). Akuntansi Syariah: Suatu Pengantar Aliran Pemikiran. *Movere Journal*, 2(2), 79–88. <https://doi.org/10.53654/mv.v2i2.106>
- Ramdhani, D., Atichasari, A. S., Mulatsih, S. N., & Rays, M. (2020). *Ekonomi islam: Akuntansi dan perbankan syariah (filosofis dan praktis di Indonesia dan dunia)*. CV MARKUMI.
- Rashid, A., Akmal, M., & Shah, S. M. A. R. (2024). Corporate governance and risk management in Islamic and conventional financial institutions: explaining the role of institutional quality. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(3), 466–498. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2021-0317>
- Rifai, F. Y. A., & Asrori, A. L. (2023). Akuntansi Dalam Kajian Filsafat Ilmu Dan Spiritualitas Islam. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan*,

**MEMBANGUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERMUTU:
SEBUAH PENDEKATAN FILSAFAT ILMU, MANAJEMEN MUTU,
DAN TRANSPARANSI AKUNTANSI**

Ekonomi, *Humaniora*, 9(1), 16–24.
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1534>

- Saputra, T. A. (2021). Islamic economic thoughts according to Ibn Khaldun, Al-Maqrizi, and Al-Syatibi. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 3(1), 89–100.
- Septiani, R. P., Rahmi, A., & Munandar, A. N. (2023). Integrasi Filsafat Ilmu dalam Akuntansi Syariah: Membangun Etika dan Keadilan dalam Praktik Bisnis Syariah. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7). <https://doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023>
- Shamsudheen, S. V., Rosly, S. A., & Aljunid, S. A. H. (2021). Drawing ethical mentation in Islamic banks; addressing operational lines heterogeneity with special reference to Al-Ghazali's ethical philosophy. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(4), 559–580. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2020-0205>
- Sokarina, A. (2020). *Islamic Political Economy of Accounting: Pembangkit Kesadaran Spiritual Berbasis Pemikiran Iwan Triyuwono, Ibnu Taimiyah, dan HOS Tjokroaminoto Untuk Kemaslahatan Umat Manusia dan Semesta*.
- Spengler, J. J. (1964). Economic Thought of Islam: Ibn Khaldūn. *Comparative Studies in Society and History*, 6(3), 268–306.
- Suripto, T. (2016). Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan Melalui Budaya Organisasi Yang Islami. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, VI(2), 144–153.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=jXejzJYAAAAJ&citation_for_view=jXejzJYAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
- Susanto, B. (2016). Total Quality Management, Sistem Pengukuran Kinerja, Penghargaan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis Ekonomi*, 14(1), 76–83.
- Susilowati, L. (2017). *Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah*. State Islamic Institute of Tulungagung.
- Toumi, K. (2020). Islamic ethics, capital structure and profitability of banks; what makes Islamic banks different? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), 116–134. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2016-0061>
- Triyuwono, I. (2017). *Akuntansi syariah perspektif, metodologi, dan teori*. Rajawali Pers.

- Vokshi, B., Spahiu, B., & Xhemajli, A. (2023). Financial Management and Information Systems in The Municipalities of Kosovo. *Quality - Access to Success*, 24(197), 18–23. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.197.03>
- Yilmaz, I. (2024). Exploring the foundations of Islamic moral economy: a return to substantive morality. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2024-0085>
- Zaki, M., & Cahya, B. T. (2015). Aplikasi Maqasid Asy-Syari'ah Pada Sistem Keuangan Syariah. *Bisnis*, 2.